

RUANG LINGKUP ADVOKASI SWAKELOLA TIPE III

Anick HT



CFLI/FCIL

Canada Fund untuk Prakarsa Lokal





1

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PEMERINTAH

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Alur Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

Fungsi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Alur RKPD

Siklus Perencanaan dan Penganggaran

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

POLITIK

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah bagian dari proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana Pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda Pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

-Menerjemahkan visi dan misi kepada daerah ke dalam dokumen perencanaan penganggaran daerah-

TEKNOKRATIK

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu

PARTISIPATIF

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penyelarasan (sinkronisasi dan sinergi) rencana pembangunan melalui musyawarah mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi, nasional.

Pendekatan *Top-down*

Kelebihan

- ✓ Keputusan dapat dibuat dan diimplementasikan dengan sangat cepat.
- ✓ Cocok untuk waktu yang terbatas.
- ✓ Dapat menyelaraskan tujuan proyek dengan tujuan strategis organisasi karena pemerintah yang memberikan arahan.

Kekurangan

- ✓ Karena rakyat tidak terlibat dalam perencanaan pembangunan, mungkin akan terjadi ketidaksepakatan.
- ✓ Komunikasi yang kurang antara pemerintah dan rakyat terkait pembangunan dapat memicu konflik.

Pendekatan *Bottom-up*

Kelebihan

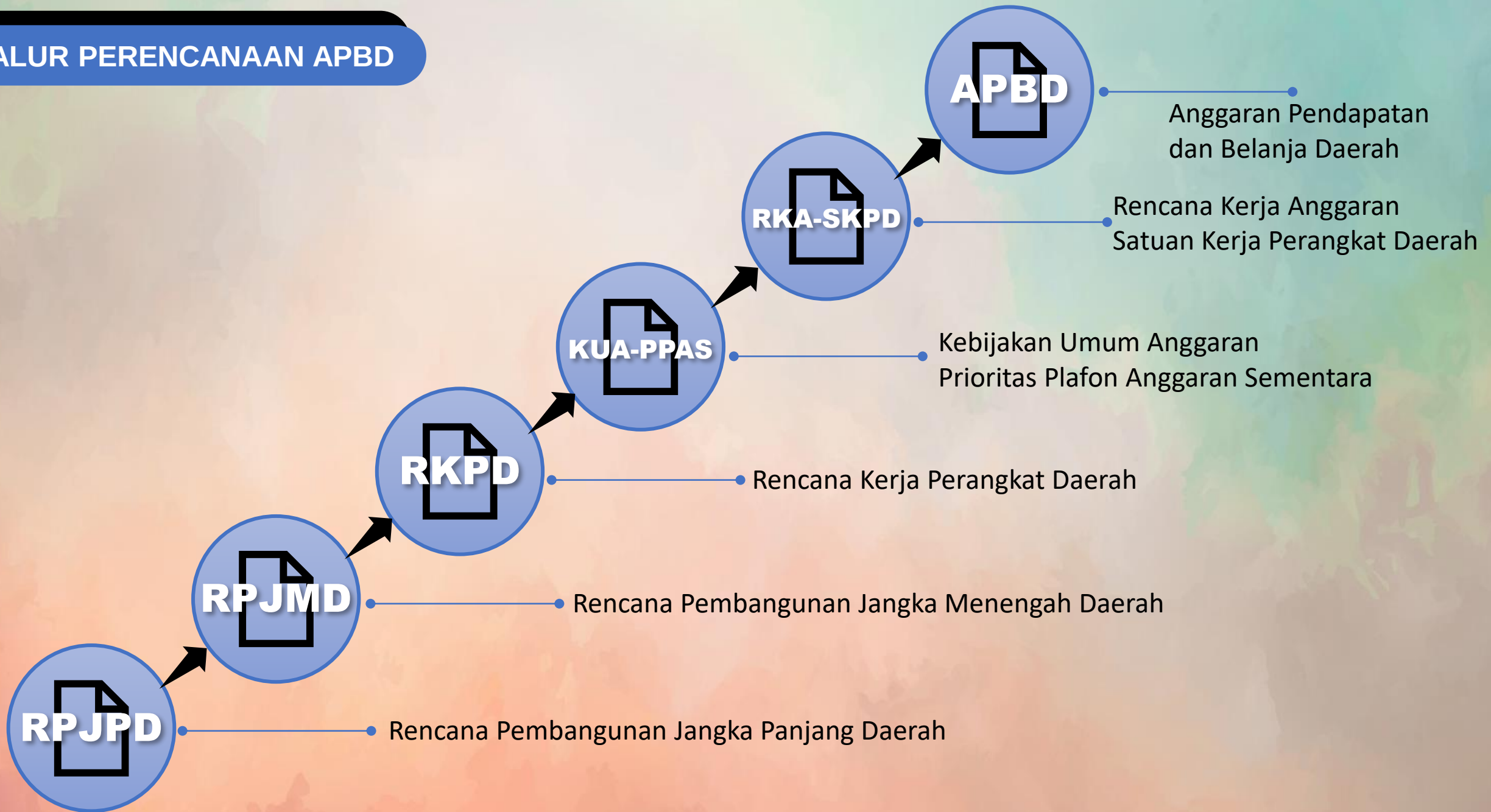
- ✓ Rakyat memiliki suara dalam perencanaan kebijakan dan keputusan dibuat secara kolaboratif.
- ✓ Kebijakan akan lebih tepat sasaran karena berasal dari suara rakyat.

Kekurangan

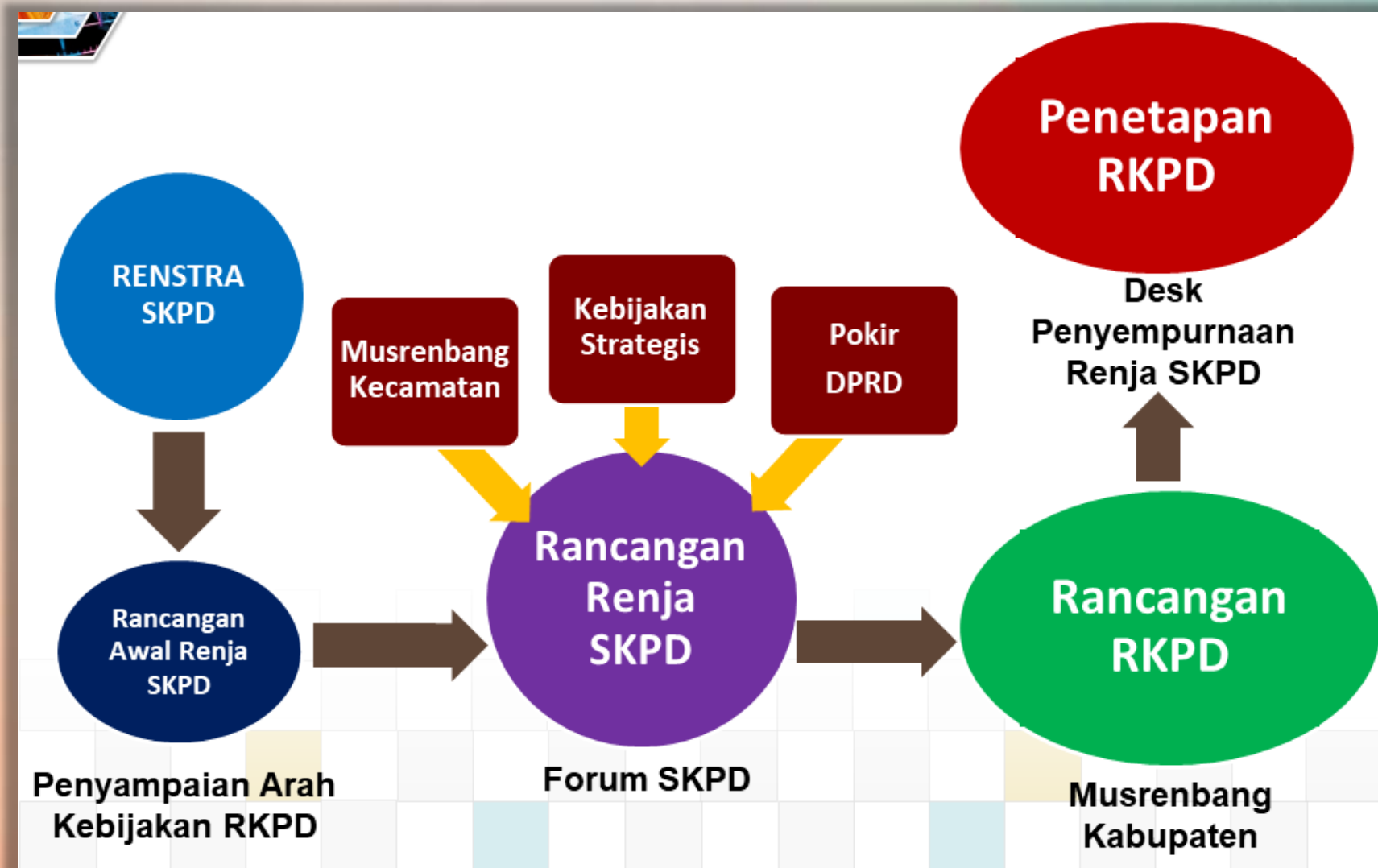
- ✓ Tahap perencanaan jauh lebih memakan waktu dan tenaga, dibandingkan dengan pendekatan *top-down*.
- ✓ Tidak cocok untuk waktu yang terbatas.
- ✓ Perencanaan memerlukan ruang lingkup dan proses kontrol yang jelas agar tetap terkendali.



ALUR PERENCANAAN APBD



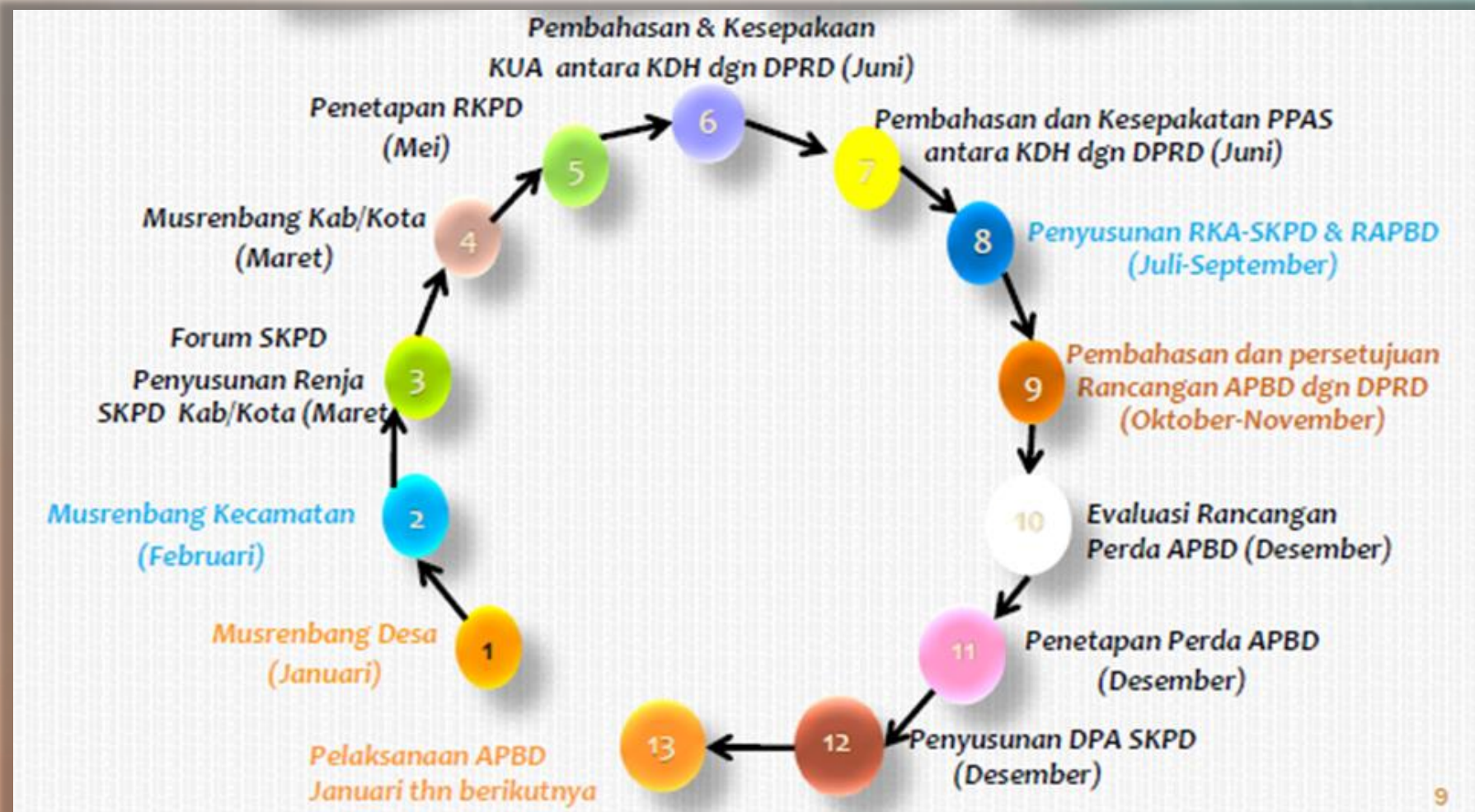
ALUR RENJA SKPD - RKPD

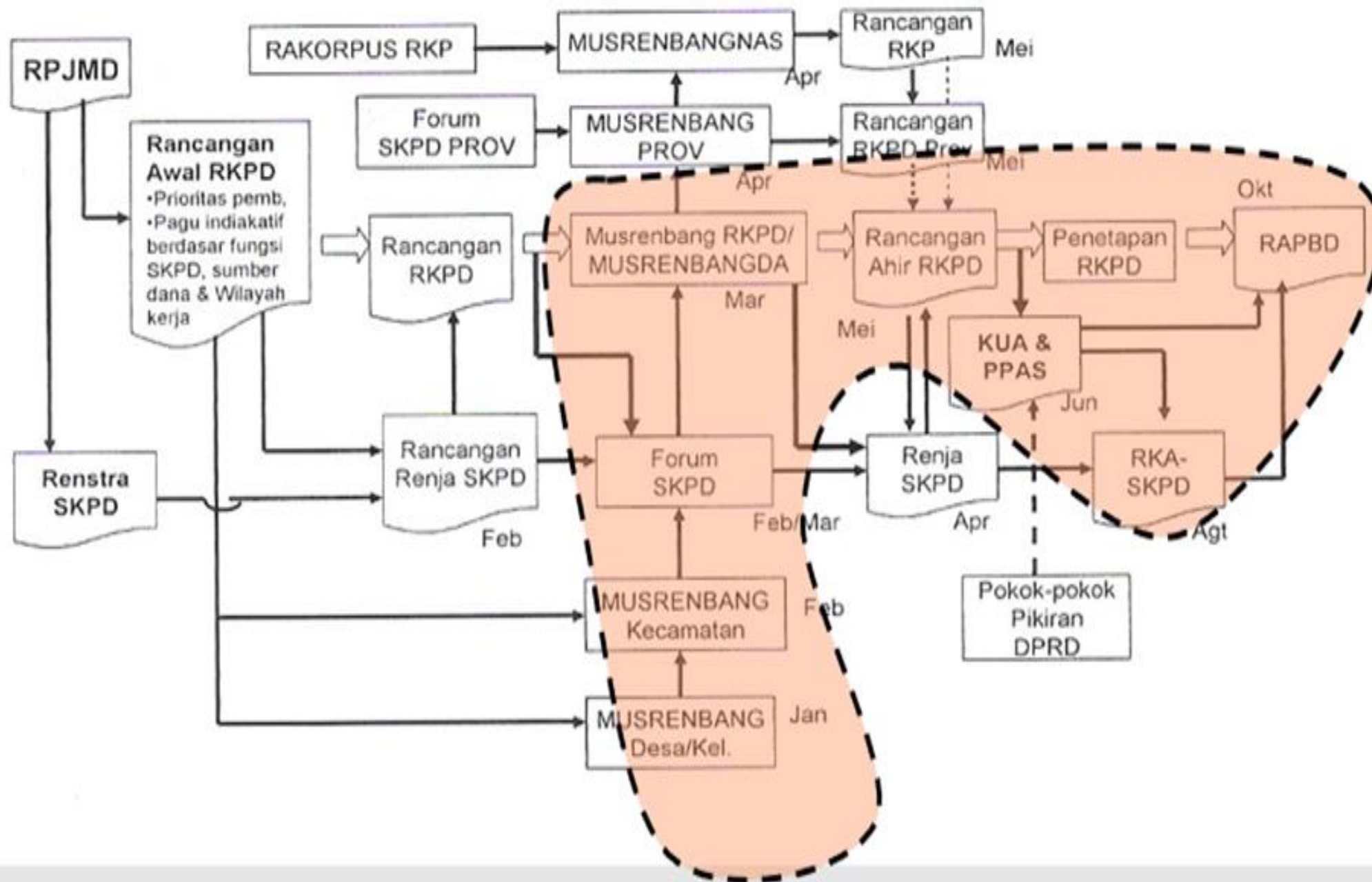


ALUR RENJA SKPD - RKPD

TAHAPAN	JADUAL (BULAN)	PELAKU/AKTOR	KELUARAN
Musrenbang desa/kel	Januari	1. Komponen Masyarakat (individu maupun kelompok) 2. Aparat desa/kel dan kecamatan 3. Bappeda dan PMD 4. Lembaga Profesi dalam desa/kel	1. Dokumen program prioritas desa/kel serta sumber pendanaannya 2. Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
Musrenbang Kecamatan	Februari	1. Delegasi desa/kel 2. Wakil masyarakat tingkat kecamatan 3. Aparat kecamatan 4. Lembaga profesi 5. Perwakilan BAPPEDA 6. Dinas/SKPD 7. Anggota DPRD Dapil bersangkutan.	1. Dokumen Rencana Kerja Kecamatan beserta pendanaannya 2. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kab/kota.
Forum SKPD Kab/Kota	Pertengahan Februari	1. Delegasi kecamatan 2. Kelompok masyarakat ditingkat kab/kota 3. Dinas/SKPD diKab/Kota 4. Bappeda Kab/kota 5. Anggota DPRD Kab/Kota 6. LSM dan ahli/profesional	1. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD. 2. Kegiatan Prioritas beserta pendanaannya 3. Daftar delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kab/Kota.
Musrenbang Kab/Kota	Maret	1. Delegasi kecamatan 2. Wakil kelompok /lembaga masyarakat tingkat kab/kota 3. Dinas/SKPD diKab/Kota 4. Bappeda 5. Anggota DPRD dari Komisi 6. Lembaga Profesi dan akademisi	1. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana balik berdasarkan fungsi/SKPD. 2. Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilih berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota; APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. 3. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan/atau Pusat. 4. Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa.
Penetapan RKPD	Mei	1. Kepala Daerah 2. Bappeda 3. Dinas/SKPD	Dokumen RKPD memuat : ✓ Rancangan kerangka ekonomi daerah ✓ Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah ✓ Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN





SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH



Sumber : YASMIB Sulawesi, diolah dari PP Nomor 12 Tahun 2019



2

BUDGET TAGGING

PEMERINTAH

MULTISTAKEHOLDERS PERSPECTIVE

DINAS-DINAS PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN
DINAS KESEHATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
DINAS PENATAAN RUANG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DINAS TENAGA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASY
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS PERHUBUNGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SAT

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

DINAS KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BADAN-BADAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN

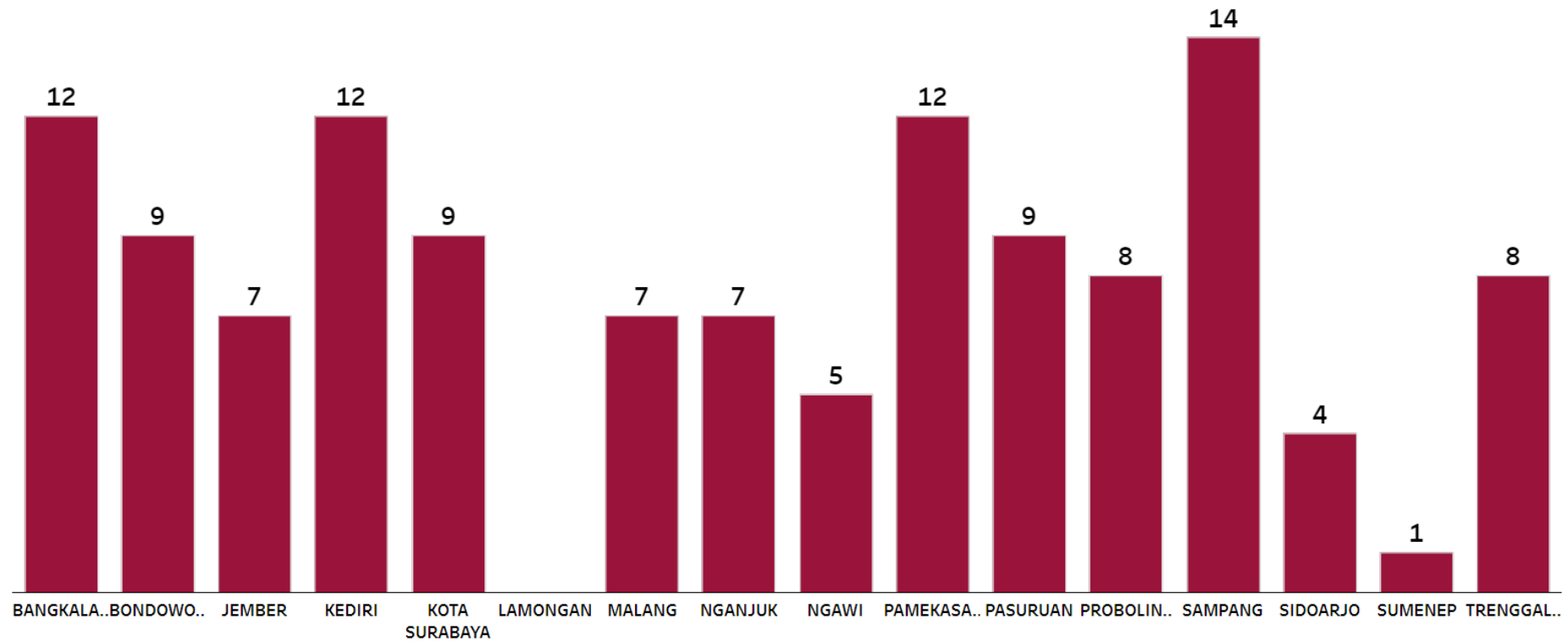
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

BADAN KESATUAN BANGSA DN POLITIK

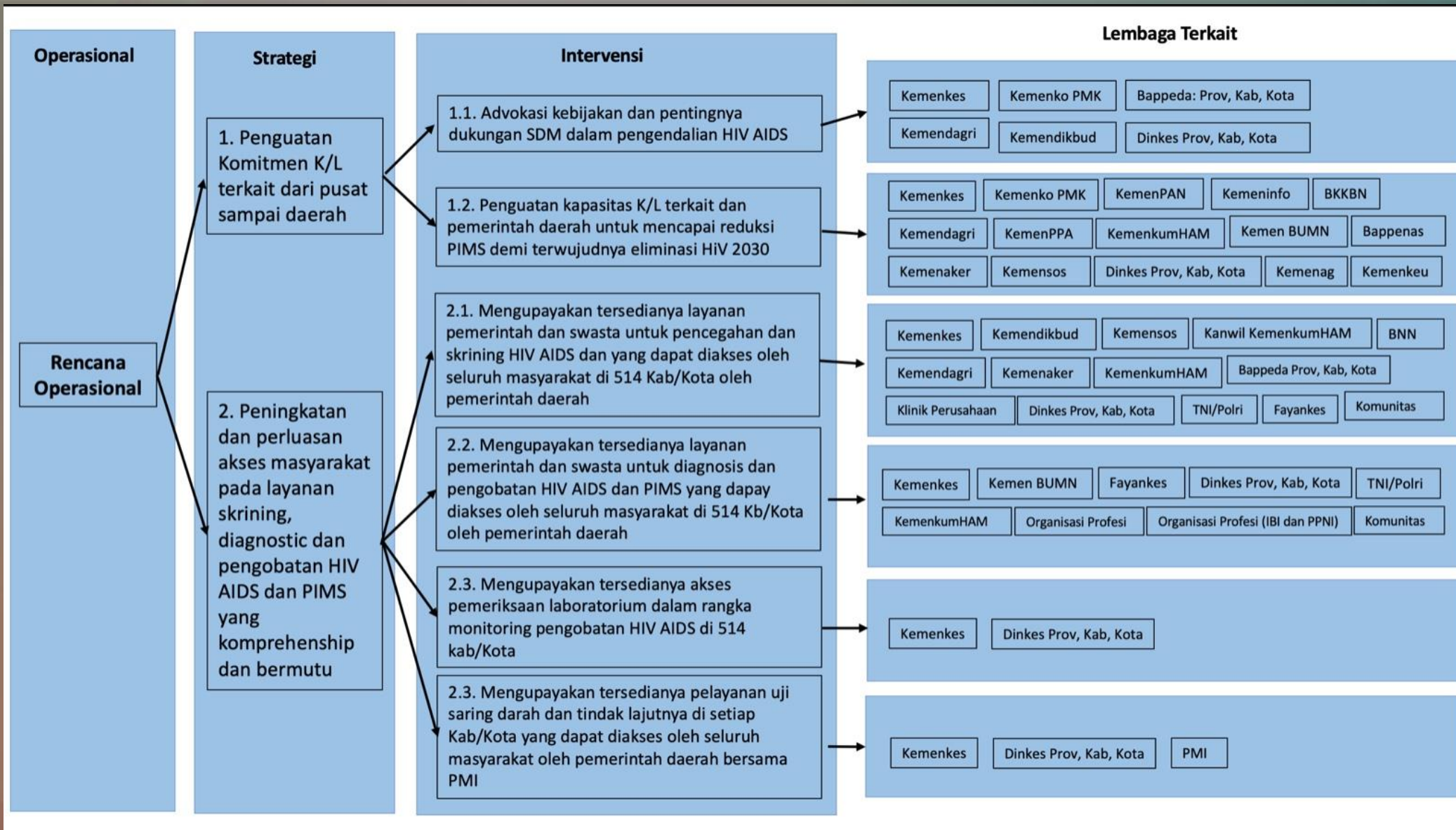
MULTISTAKEHOLDERS PERSPECTIVE

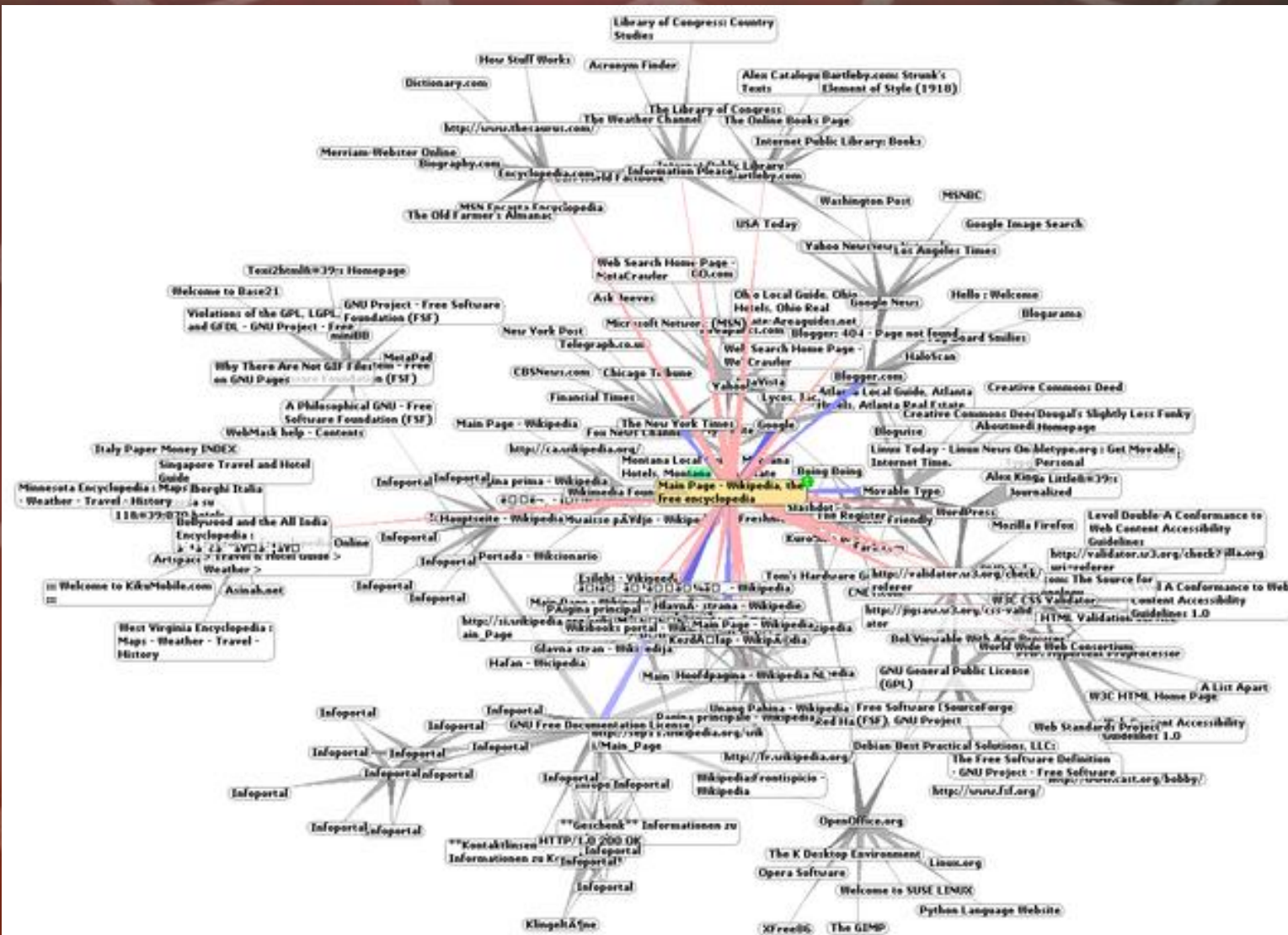
Jumlah OPD yang mendapat alokasi anggaran
dalam APBD untuk *stunting* per kabupaten/kota TA 2020



Sumber data: Web Monitoring Bangda-Form Aksi Konvergensi 2.3

MULTISTAKEHOLDERS PERSPECTIVE

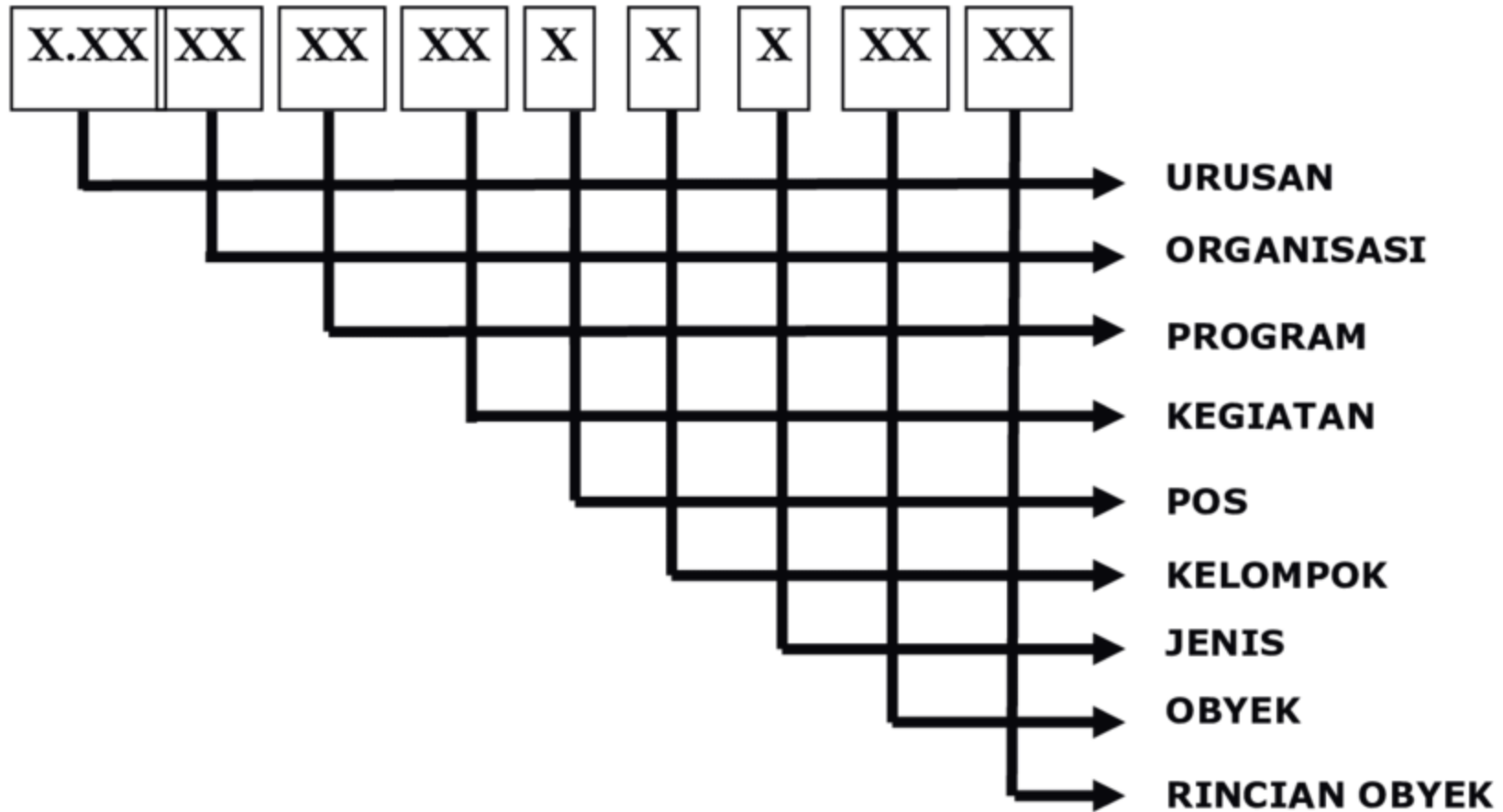




KOTA MAKASSAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
								Jumlah Pendapatan	0	
0	00	1.06.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	27.347.146.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	997.722.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	41.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	41.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	41.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	41.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	00			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	956.722.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	407.580.000	



Lampiran I : Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Timur
 Nomor :
 Tanggal :

PROVINSI JAWA TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	147.722.500	147.722.500	0	0 %
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	83.886.908.590	86.377.908.590	2.491.000.000	3 %
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	88.785.350.000	88.785.350.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	13.892.396.325	13.694.796.325	(197.600.000)	1 %
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	8.042.895.489	8.042.895.489	0	0 %
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	201.722.607.982	203.717.774.982	1.995.167.000	1 %
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	34.486.774.000	34.486.774.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	231.866.560	231.866.560	0	0 %
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	13.632.499.000	13.632.499.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	27.146.475.000	27.146.475.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.681.519.602	4.681.519.602	0	0 %
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	157.038.900	157.038.900	0	0 %
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	216.000.000	216.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	585.000.000	585.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.844.273.000	3.844.273.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.418.223.100	2.405.348.100	(12.875.000)	1 %
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	103.700.000	103.700.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	72.192.000	72.192.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	25.049.500	25.049.500	0	0 %
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	148.466.100	148.466.100	0	0 %
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.639.378.600	1.639.378.600	0	0 %

SALINAN LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 112 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 106 TAHUN
 2017 TENTANG STANDARISASI KODE REKENING
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REKENING BELANJA

KODE REKENING					URAIAN	PENJELASAN REKENING
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN		
5					BELANJA DAERAH	
5	1				BELANJA LANGSUNG TIDAK	
5	1	1			Belanja Pegawai	
5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	
5	1	1	01	01	Gaji Pokok	Untuk menampung pengeluaran atas Belanja Gaji Pokok PNS dan CPNS serta Uang Representasi Dewan. Pembayaran Gaji Pokok PNS, CPNS dan Uang Representasi berdasarkan peraturan yang berlaku.
5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	Untuk menampung pengeluaran atas pemberian Tunjangan Keluarga kepada PNS/CPNS sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	Untuk menampung pengeluaran atas pemberian Tunjangan Jabatan kepada PNS yang menduduki/menjabat Jabatan Struktural yang besarnya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	Untuk menampung pengeluaran atas pemberian Tunjangan Fungsional kepada PNS yang ditetapkan sebagai Tenaga Fungsional dan tidak menduduki Jabatan Struktural, yang besarnya menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	Untuk menampung pengeluaran atas pemberian Tunjangan Fungsional Umum kepada PNS yang tidak mempunyai Jabatan Fungsional maupun Struktural, yang besarnya sesuai dengan Pangkat dan Golongan serta berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun Anggaran 2023**

DPA - BELANJA SKPD

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.18 - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah						
Urus an	Sub Urus an	Prog ram	Kegi atan	Sub Kegi atan			T-1	T					T+1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.685.520.000	679.797.000	0	0	0	679.797.000	0
	1.02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		2.685.520.000	679.797.000	0	0	0	679.797.000	0
		02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		2.487.835.000	523.700.000	0	0	0	523.700.000	0
			1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		2.000.000.000	0	0	0	0	0	0
				10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		0	0	0	0	0	0	0
				11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan		0	0	0	0	0	0	0
				12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan		0	0	0	0	0	0	0
				13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		0	0	0	0	0	0	0
				14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)		0	0	0	0	0	0	0
				20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		0	0	0	0	0	0	0
				22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		2.000.000.000	0	0	0	0	0	0
			1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		0	0	0	0	0	0	0
				13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		0	0	0	0	0	0	0



3 SIRUP

SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN

ALUR SIRUP



sirup.lkpp.go.id

< > C sirup.lkpp.go.id/sirup/loginctr/index

SiRUP ▶

Rekap Cari Paket ▾ Panduan FAQ Berita Dashboard ▾ Kontak ▾

SiRUP ▶
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan



Username

Kata Sandi

Pencarian Paket Swakelola Nasional

Tampilkan 10 entri

Copy

Pencarian

Cari dengan kata kunci

KLPD

- ☐ Bendahara Umum Negara (Kementerian Keuangan)
- ☐ Kementerian Agama
- ☐ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
- ☐ Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- ☐ Kementerian Dalam Negeri

[Lihat Selengkapnya...](#)

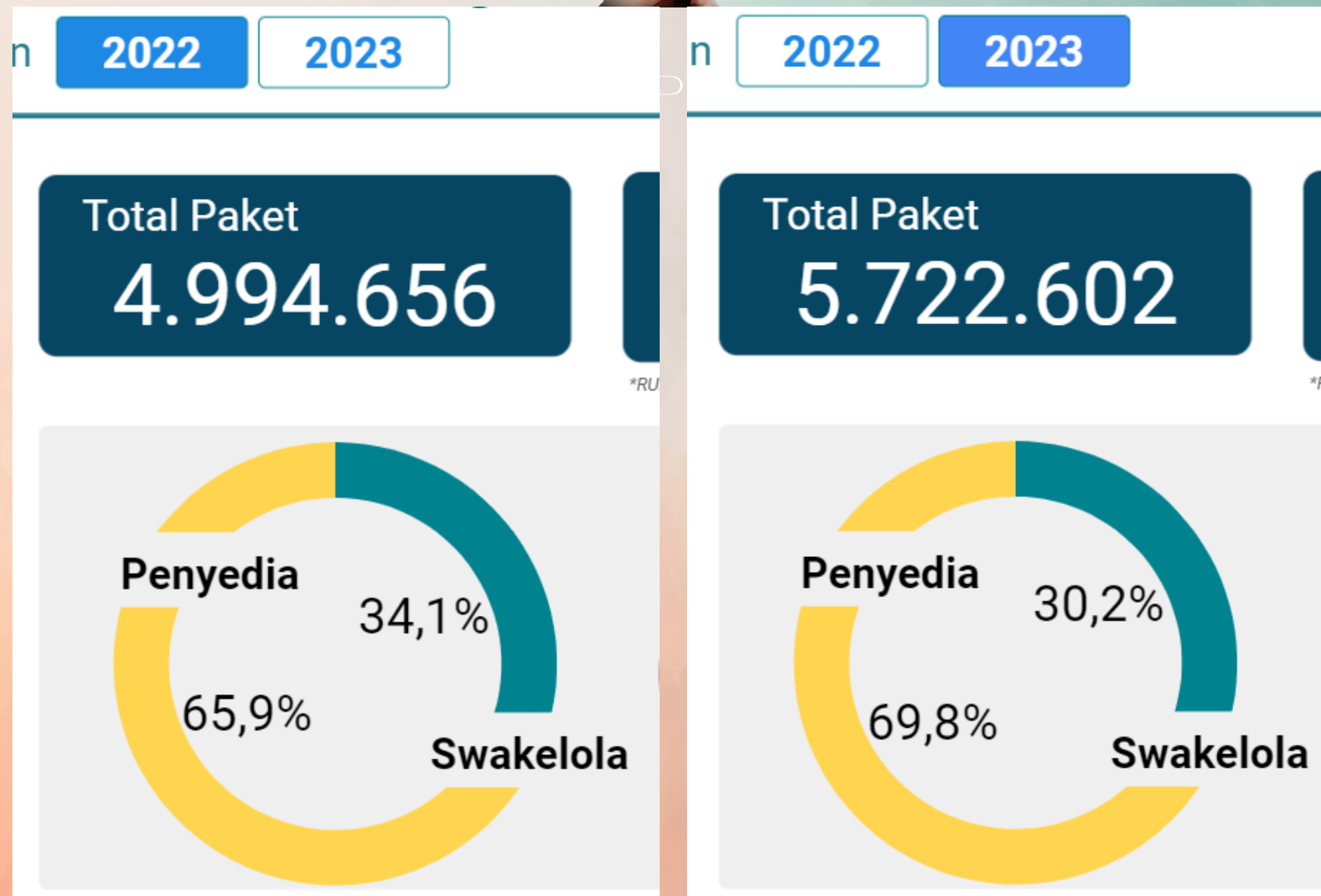
Lokasi

- ☐ Aceh Tamiang (Kab.)
- ☐ Langsa (Kota)
- ☐ Nagan Raya (Kab.)

No	Paket	Pagu (Rp)	Tipe Swakelola	Pemilihan	K/L/PD	Satuan Kerja	Lokasi	ID
1	Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia kegiatan In House Training Sertifikasi Good Manufacturing Practices (GMP), Sanitation Standard Operation Procedures (SSOP) serta Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Mutu	16,800,000	3	February 2024	Provinsi DKI Jakarta	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	DKI Jakarta,Jakarta Pusat (Kota)	35804207
2	Pembayaran operasional posyandu dan honor jumantik	904,000,000	3	January 2024	Provinsi DKI Jakarta	KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS	DKI Jakarta,Jakarta Pusat (Kota)	35899022
3	Pembayaran honorarium anggota FKDM dan uang pulsa Ketua FKDM	139,800,000	3	January 2024	Provinsi DKI Jakarta	KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS	DKI Jakarta,Jakarta Pusat (Kota)	35894267
4	Pembayaran honorarium penceramah pelaksanaan hari besar keagamaan dan kegiatan keagamaan lainnya	8,100,000	3	January 2024	Provinsi DKI Jakarta	KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS	DKI Jakarta,Jakarta Pusat (Kota)	35897262
5	Peningkatan Kapasitas Lembaga kemasyarakatan oleh PKK Kelurahan melalui DAU	10,200,000	3	January 2024	Provinsi DKI Jakarta	KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS	DKI Jakarta,Jakarta Pusat (Kota)	35905557
6	Pembayaran honorarium PKK	111,888,000	3	January 2024	Provinsi DKI Jakarta	KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS	DKI Jakarta,Jakarta Barat (Kota)	35904363
7	Pembayaran honorarium TNI / Polri	48,000,000	3	January 2024	Provinsi DKI Jakarta	KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS	DKI Jakarta,Lainnya	35905798
8	<u>Pembayaran operasional RT, RW serta BPJS Ketenagakerjaan, uang operasional LMK dan uang kehormatan LMK</u>	3,457,804,800	3	January 2024	Provinsi DKI Jakarta	KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS	DKI Jakarta,Jakarta Pusat (Kota)	35895981
9	Pembayaran instruktur senam	13,200,000	3	January 2024	Provinsi DKI Jakarta	KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS	DKI Jakarta,Jakarta Pusat (Kota)	35898321

Detil Paket

Kode RUP	35895981				
Nama Paket	Pembayaran operasional RT, RW serta BPJS Ketenagakerjaan, uang operasional LMK dan uang kehormatan LMK				
Nama KLPD	Provinsi DKI Jakarta				
Satuan Kerja	KELURAHAN KEMAYORAN - JAKPUS				
Tipe Swakelola	3				
Penyelenggara Swakelola	Dengan Organisasi Masyarakat				
Tahun Anggaran	2024				
Lokasi Pekerjaan					
	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota		
	1.	DKI Jakarta	Jakarta Pusat (Kota)		
			Detail Lokasi		
			Kantor Kelurahan Kemayoran		
Volume Pekerjaan	12 bulan				
Uraian Pekerjaan	Operasional RT/RW serta BPJS Ketenagakerjaan dan LMK				
Sumber Dana	No.	Sumber Dana	KLPD	MAK	Pagu
	1.	APBD	Provinsi DKI Jakarta	7.01.02.6.02.0004.5.1.02.02.01.0004.	Rp. 120.000.000
	2.	APBD	Provinsi DKI Jakarta	7.01.02.6.02.0004.5.1.02.02.01.0004.	Rp. 180.000.000
	3.	APBD	Provinsi DKI Jakarta	7.01.02.6.02.0004.5.1.02.02.01.0004.	Rp. 2.832.000.000
	4.	APBD	Provinsi DKI Jakarta	7.01.02.6.02.0004.5.1.02.02.02.0006.	Rp. 14.160.000
	5.	APBD	Provinsi DKI Jakarta	7.01.02.6.02.0004.5.1.02.02.02.0007.	Rp. 9.628.800
	6.	APBD	Provinsi DKI Jakarta	7.01.02.6.02.0004.5.1.02.02.01.0004.	Rp. 300.000.000
	7.	APBD	Provinsi DKI Jakarta	7.01.02.6.02.0004.5.1.02.02.02.0006.	Rp. 1.200.000
	8.	APBD	Provinsi DKI Jakarta	7.01.02.6.02.0004.5.1.02.02.02.0007.	Rp. 816.000
	Total Pagu				Rp. 3.457.804.800





SIRUP 2022

SIRUP 2023

Tabel 3.2. Ketersediaan Paket Swakelola dan Swakelola Tipe III di Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten se-Indonesia.

No	Pemerintah Daerah	N	Paket Swakelola	Paket Swakelola Tipe III	Prosentase (%)
1.	Provinsi	92	170.271	1.430	0,8%
2.	Kota	32	287.809	1.470	0,5%
3.	Kabupaten	399	961.373	2.755	0.3%
TOTAL		523	1.419.453	5.655	0.4%

Tabel 3.2 Perbandingan Swakelola dan Swakelola Tipe III 2023

K/L/PD	Paket Swakelola	Paket Swakelola Tipe III	Persentase
Kementerian/ Lembaga	442.185	840	0,2%
Provinsi	145.390	471	0,3%
Kota	256.708	711	0.3%
Kabupaten	826.756	3.308	0.4%
Total	1.671.039	5.330	0,3%



Tabel 3.5. Kategorisasi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Swakelola Tipe III di SiRUP

No	Kategori barang Jasa	Deskripsi jenis barang/jasa temuan yang tidak ideal
1	Konstruksi	• Pembangunan jalan arteri kota, • Pembangunan jalan kabupaten, • Pembangunan irigasi, • Pembangunan jembatan, • Pembangunan gedung SD, • Pembangunan gedung SKPD, • Renovasi gedung pemerintah, • Perawatan gedung pemerintah
2	Operasional Pemda	• Tiket pesawat • Akomodasi hotel • Uang saku rapat ASN • Uang saku perjalanan dinas ASN • Gaji pegawai honorer • Uang lembur ASN • Gaji & tunjangan ASN • Pembayaran pajak asset • Pembayaran pajak bea impor barang Pemda
3	Barang	• Pengadaan kendaraan dinas • Pembelian voucher BBM kendaraan dinas • Pengadaan seragam dinas ASN Pemda • Pembayaran pajak • Pembayaran listrik, PAM, Internet Pemda • Komputer pemda

Tabel 3.6. Pemda yang memiliki paket Swakelola Tipe III dengan jenis yang sama

No	Pemerintah Daerah	Temuan & Deskripsi
1.	Kabupaten Parigi Moutong	Dari 80 paket Swakelola yang tersedia, keseluruhannya adalah konstruksi pembangunan gedung dan jalan
2.	Kabupaten Maluku Tengah	28 Paket Swakelola Tipe III, seluruhnya konstruksi gedung
3.	Kabupaten Gorontalo	Paket Swakelola Tipe III, seluruhnya konstruksi gedung
4.	Kabupaten Grobogan	Dari 34 Paket Swakelola yang tersedia, seluruhnya merupakan pengadaan ATK / stationary
5.	Kota Serang	Paket Swakelola Tipe III konstruksi pembangunan jalan senilai 33 milyar
6.	Provinsi Kalimantan Tengah	Dari 42 paket Swakelola Tipe III yang tersedia, seluruhnya adalah konstruksi pembangunan / perawatan jalan provinsi dan gedung.
7.	Kabupaten Karimun & Kota Kupang	Hibah untuk pemerintah pusat

ISTILAH & AKTOR KUNCI

- Istilah-istilah teknis dokumen pemerintah:

- RPJPD
- RPJMD
- RKPD
- KUA_PPAS
- RKA
- SKPD-OPD
- APBD
- Renstra
- Renja
- DPA

- Istilah-istilah teknis lainnya:

- SIRUP
- UKPBJ

- Aktor-aktor kunci:

- Bappeda/Bappelitbangda
- UKPBJ-Tim PBJ OPD
- Bakesbangpol
- Sekda-Kesra
- Walikota-Wakil Walikota
- DPRD
- TAPD